

Aliansi yang Memberdayakan



Beraliansi
Membuka
Akses Pasar



Mewujudkan
Rempah
Berkualitas



Demi
Demokratisasi
di Hutan

Daftar Isi



Sekapur Sirih	03
ICCO dan Programnya di Indonesia	04
Testimoni CEA	10
Infografis: Jejak CEA	12
Testimoni ICCO	14
Indonesia di Jalur 3 dan 4	15
Jalan ke-3	16
Untuk Petani yang Lebih Berkemampuan	20
Mewujudkan Rempah Berkualitas	22
Hadirnya Platform DAKOTA	28
Infografis: Tonggak Proses Lobi	32
Atas Nama Demokratisasi di Hutan	34
Perhutanan Sosial	40
Demi Beras yang Lestari dan Petani yang Sejahtera	42
Standar Kelestarian Beras	48
Mengukur Kebijakan dengan Data	50
Beraliansi Membuka Akses Pasar	56
Rekomendasi-rekomendasi	62
Pembelajaran untuk ToC Generik	66

Diterbitkan oleh: Yayasan Penabulu



Foto-foto:
Penabulu, Hukatan, PKPA, KpSHK, KRKP,
SPKS, Konsil LSM Indonesia

KISWARA SANTI PRIHANDINI. Program Manajer CEA Indonesia

Terima Kasih Mitra CEA Indonesia

PADA 2015, saat saya diminta menjadi Program Manager Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia, saya merasa optimistis dapat menjalankan semua tugas dan kewajiban. Saya yakin akan keberhasilan program ini karena beberapa prasyarat telah terpenuhi, yakni melakukan lobi dan advokasi berorientasi kepada komoditas lokal berorientasi ekspor, berambisi melakukan perubahan nyata bersama para penghasil pangan dan serikat pekerja, serta bekerja berdasarkan agenda lobi yang terkoneksi dari lokal, nasional, hingga ke pasar internasional.

Saya bekerja bersama tim yang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, dan semangat berkobar, menunjukkan gelagat dan maksud positif, serta penuh dedikasi. Setiap pertemuan, perjalanan, dan kendala saya hadapi bersama kolega dan mitra, serta membagi kebahagiaan serta kesuksesan bersama.

CEA Indonesia bukan milik saya, melainkan milik kita semua.

Program ini durasinya terbatas, namun warisannya akan dapat bermanfaat untuk masa selanjutnya.

*CEA
Indonesia
bukan milik saya,
melainkan milik
kita semua.*





Persiapan sebelum memulai misi. Tujuan program Civic Engagement Alliance adalah memberdayakan petani kecil pada beberapa komoditas pangan dan mengubah perilaku perusahaan agar menghormati HAM.

ICCO

dan Programnya di Indonesia

Sekelompok organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization (CSO)* berkumpul di Jakarta pada 14-15 Maret 2017.

Bersama perwakilan asosiasi pengusaha komoditas, asosiasi dewan komoditas, universitas, lembaga negara, pemerintah, dan organisasi buruh, mereka menghadiri deklarasi Civic Engagement Alliance: For Convening and to Convincing, program ICCO Cooperation yang didukung Kementerian Luar Negeri Kerajaan Belanda.

Ikut meramalkan acara, kala itu, adalah organisasi-organisasi yang mewakili konsorsium global, yakni CNV Internasionaal, Kerk in Actie, ICCO Global Office, dan ICCO Regional Office.

Program global yang diselenggarakan di Indonesia merupakan hasil kajian dan perumusan terhadap kendala-kendala yang ditemukan dalam program kedaulatan pangan dan pengusaha kecil. Ini meliputi sektor perberasan dan produksi beras sehat, sektor perkebunan dan pekebun rempah. Bidang lain adalah upaya pemenuhan standar hak asasi manusia, khususnya dalam perekrutan pekerja dan penjaminan hak pekerja di sektor perkebunan, pertanian, dan perhutanan.

Tujuan program adalah mengubah perilaku perusahaan agar menghormati hak asasi manusia serta memberdayakan petani kecil pada komoditas-komoditas tertentu yang berkaitan dengan pangan.

Berjalan lima tahun, antara 2016-2020, program Civic Engagement Alliance (CEA) telah melaksanakan banyak kegiatan. Ada perubahan-perubahan; kesempatan untuk “naik kelas” kejenjang yang lebih tinggi pun sangat memungkinkan.

Saat ini pasar menuntut lebih banyak bukti keberlanjutan, lebih sedikit gesekan dengan masyarakat lokal, kesehatan dan keseimbangan lingkungan, serta perusahaan menjadi segmentasi konsumen yang lebih baik. Belum semua perusahaan mau mempraktikkan perubahan sistemik. Tapi perusahaan sebetulnya ingin berubah, hanya membutuhkan mitra—untuk berbicara, memotivasi, dan berkolaborasi melancarkan tindakan korektif.

Dalam rantai bisnis, pengusaha kecil—petani dan pedagang—merupakan bagian penting. Karenanya, untuk bisa memahami kekuatan internal dan eksternal yang mengendalikan perubahan kekuatan masyarakat bawah, diperlukan pemahaman terhadap kondisi nyata petani dan pedagang kecil beserta jaringan nilai berbasis pertanian dan



Sesi peningkatan kapasitas.

komoditas. Agar keseimbangan bisnis dicapai, jaringan nilai itu harus bisa menyeimbangkan hasil usaha sekaligus memenuhi kebutuhan pemangku kebijakan, seperti standar kelayakan produk. Penerapan standar kelayakan sejak dari hulu harus dijalankan.

Harapan dari program CEA di Indonesia adalah bisa mempertemukan berbagai pihak—pemerintah, perusahaan, pekerja, pedagang kecil, petani— demi berlangsungnya bisnis yang berperspektif hak asasi manusia.

Secara umum, mitra CEA mampu mewujudkan sinergi dengan perusahaan dan pemerintah melalui lobi dan advokasi. Lembaga-lembaga mitra telah memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi perbaikan prosedur operasi standar perusahaan dan kebijakan di level kabupaten hingga nasional.

PROGRAM UTAMA DI INDONESIA

CEA Indonesia merupakan bagian dari program global. Tapi dari empat pilarnya, hanya dua yang diimplementasikan di Indonesia, yaitu Small holders Empowerment (SHE) dan Responsible Business (REB).

SHE berupaya memberdayakan para pemangku kepentingan dan jaringan pengusaha-petani kecil di bidang pangan dan komoditas, memperbaiki dan menyediakan produk yang konsisten dan penganekaragaman produk,

serta menghormati prinsip dan nilai hak asasi manusia.

- Isu 1: Akses pasar dan perbaikan standar
- Isu 2: Keterlibatan pengusaha kecil dalam memenuhi beraneka standar (sosial, lingkungan, hak asasi manusia, dsb.): Indonesia/ internasional
- Isu 3: Subsidi/insentif negara/pemerintah untuk produksi yang baik
- Isu 4: Mengarusutamakan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis di level pengusaha kecil-menengah
- Isu 5: Memperbaiki pendapatan pekerja dengan intervensi kreatif

- Isu 6: Pemahaman terhadap aturan-aturan pasar dan aktor pasar
- Isu 7: Kembalikan nilai-nilai baik kedalam bisnis—manajemen pengetahuan
REB bertujuan mengangkat ke permukaan perspektif hak asasi manusia dalam praktik di dunia usaha atau bisnis. Ini dijalankan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan asosiasi pengusaha.
- Isu1: (Kesadaran) Hak yang tak dilindungi (di perusahaan perkebunan tanaman pangan)
- Isu 2: (Kesadaran) Praktik bisnis yang tak efektif dan tak terhormat

- Isu 3: (Komunikasi) Mekanisme hak asasi manusia yang rumit. Bagaimana menyederhanakannya/menjadikan ramah hak asasi manusia
- Isu4: (Komunikasi) Mekanisme koordinasi antar pemerintah untuk pemulihan dan penyelesaian keluhan
- Isu5: (Peluang) Sertifikasi hak asasi manusia yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja
- Isu6: (Peluang) Pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia/hak pekerja
- Isu7: (Strategi kepatuhan) Hak asasi manusia dan bisnis dan bagaimana menekan/memotivasi perusahaan agar lebih bertanggung jawab

Ada dua pilar, semacam kerangka kegiatan, dalam program, yakni Pathway 3, tentang pemberdayaan pengusaha kecil atau *smallholders empowerment* (SHE); dan Pathway 4, tentang bisnis yang bertanggung jawab atau *responsible business* (REB). Keduanya dijalankan oleh aliansi masyarakat sipil, serikat petani, asosiasi bisnis, dan tokoh-tokoh birokrasi.

Dalam pilar Pathway 3, mitra CEA yang berfokus kepada SHE telah melakukan lobi dan advokasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*)—pada komoditas-komoditas rempah, beras, hortikultura, dan sawit. Dalam kerangka Pathway 4, mitra yang memiliki perhatian kepada REB pun telah melakukan hal yang sama. Lembaga-lembaga itu mendapatkan capaian berupa panduan,

kesepakatan dengan pemangku kebijakan, kajian akademis, dan advokasi ke lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jaminan keamanan konsumen.

Selain itu, telah dihasilkan keluaran sesuai keahlian mitra, yakni Community, Trade Union and Sosial Dialogue; Commodity Based Lobby; dan Corporate and Social Responsibility. Selama empat tahun para mitra memiliki tonggak masing-masing yang menjadi identitas penerapan CEA, yang menggambarkan perubahan pada saat melaksanakan lobi dan advokasi.

Mitra CEA juga telah memberikan masukan untuk perbaikan prosedur operasi standar penyelenggaraan bisnis serta kebijakan di tingkat kabupaten dan nasional.

Aktivitas Lobi dan Advokasi yang Dilakukan ICCO Indonesia

Tahun	Lobi dan Advokasi (Non-Project Admin)
2016	Melakukan baseline bersama seluruh program di 12 negara bersama Global Office
2017	Membangun lobby chain dan mendesain kerjasama kemitraan
2017	Inisiasi Sustainable Spice Initiative, mempresentasikan Risk Assessment di sektor rempah di Jakarta, Indonesia
2017	Mendorong kunjungan CEA Global ke kebun sawit dan melakukan high level meeting dengan GAR

Tahun	Lobi dan Advokasi (Non-Project Admin)
2017 - 2018	Lobby forum bersama grower Kelapa Sawit Cargill, Golden Agri-Resources, Musim Mas, Sime Darby Plantations and Wilmar (2017-2018) bersama CNV Internationaal
2018	Pertemuan CEA bersama anggota Parlemen Belanda di Den Haag
2018	Audiensi CEA bersama SER di Den Haag
2018	Mempresentasikan studi kasus Rempah dan Responsible Business Principles dalam pertemuan perusahaan anggota SER di Utrecht
2019	Mendesak dan mendukung keterlibatan ICCO dalam Pledge untuk SDG 2 bersama korporasi
2019	Memfasilitasi inisiasi untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan parlemen Belanda bidang Kebijakan Kemitraan Pembangunan Luar Negeri
2019	Menginisiasi pertemuan bersama Bappenas untuk memperkenalkan SRP (Sustainable Rice Platform) Indonesia
2019	Mempromosikan pentingnya keterlibatan CSO dalam perdamaian, melalui lobi dan advokasi yang inklusif bersama PRISMA Netherland
2019	Mendorong kerjasama dan keterlibatan CEA lintas negara dengan AICHR
2019	Mendorong dan mempromosikan Southern Led Alliance Partnership
2019 - 2020	Mendesak dan mempromosikan poros keseimbangan dan menguji Power Awareness Tool bersama Partos Netherland
2020	Mendorong keikutsertaan produk Dakota Penabulu untuk terlibat dalam 30 Digital Innovative Awards
2020	Mempromosikan, mendorong adanya Policy Hackaton bersama mitra CEA Indonesia
2020	Terlibat aktif dalam pendirian Perkumpulan Rempah Berkelanjutan/SSI (Sustainable Spices Initiative) Indonesia, termasuk terlibat dalam dialog perumusan Roadmap 2020-2025

Civic Engagement Alliance

[C] "Civic"



MARIT MAIJ
Direktur Pelaksana CNVInternationaal

MENCIPTAKAN lebih banyak ruang sipil, khususnya bagi kelompok rentan-untuk inilah Civic Engagement Alliance (CEA) didirikan. Terlalu sering kelompok ini tidak terlihat, tidak terdengar,

dan mereka akan tetap begitu jika kita tidak memberi tempat untuk mereka di ruang publik. Di banyak negara hal ini sulit dicapai, tapi kami percaya itu bisa dilakukan melalui apa yang kami sebut "pendekatan orang dalam". Pendekatan ini menggunakan dialog, alih-alih konfrontasi. Dan itu terbukti. Di Indonesia, kami memperkuat posisi pekerja kelapa sawit dengan menjalin dialog sosial dengan produsen seperti Wilmar. Di Kamboja, di mana pemilik perkebunan besar sering mengambil tanah dari petani kecil dan kemudian mempekerjakan petani tersebut, CEA telah menunjukkan bahwa masalah hak atas tanah dan hak tenaga kerja seiring sejalan. (Pemahaman) ini penting untuk mengatasi kedua masalah tersebut bersama-sama secara berurutan, untuk menghilangkan masalah secara keseluruhan. Persis seperti itulah yang kami lakukan di Kamboja.

[E] "Engagement"



RON RIJBENDE
Direktur Edukans

ENGAGEMENT, bagi saya, memiliki tiga komponen. Yang pertama adalah sosial, di mana Anda berbicara tentang, misalnya, posisi produsen kecil dalam rantai makanan. CEA membantu

produsen kecil ini memecahkan masalah seperti hasil panen yang rendah dan kurangnya sumber daya. Sayang sekali kami tidak dapat melanjutkan program ini, karena pendekatan ini benar-benar berhasil. Yang kedua adalah keterlibatan politik. Kami mendorong pemerintah untuk memperbaiki keadaan yang dialami kelompok tertentu, seperti petani skala kecil. Salah satu pencapaian kami adalah membantu membujuk pemerintah Uganda untuk menyediakan seribu penyuluh pertanian. Komponen ketiga adalah kepemilikan. Orang-orang di tempat mereka bekerja harus memiliki upaya lobi yang dilakukan untuk kepentingan mereka. Jadi, Anda harus memberi mereka kapasitas untuk melakukan hal itu. Pelatihan dalam melobi dan advokasi yang kami berikan berkontribusi besar untuk peningkatan kapasitas tersebut.

[A] "Alliance"



SYBREN ATTEMA
CEO ICCO Cooperation

ALIANSI adalah koalisi dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini tujuan itu bukan finansial, tetapi kehidupan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Semua anggota aliansi memiliki keahlian khususnya sendiri. Dengan menyatukan keahlian tersebut dan adanya fokus tujuan yang jelas, Anda tidak hanya memperkuat anggota aliansi, tetapi juga orang-orang di tempat Anda bekerja. Dalam kasus seperti itu, keseluruhan menjadi lebih besar dari pada jumlah bagian-bagiannya. Jika anggota aliansi memiliki latar belakang yang beragam, pertama-tama Anda harus menginvestasikan banyak energi untuk menemukan nilai-nilai yang sama. Namun dalam kasus kami, ini tidak perlu, karena kami memiliki latar belakang yang sama. Nilai-nilai kebersamaan kami juga tecermin dalam cara kami bekerja, misalnya dengan menekankan pentingnya dialog. Karena itu, menurut saya, CEA tidak berakhir di sini. Ini akan tetap menjadi jaringan organisasi dengan pikiran yang sama.

Civic Engagement Alliance (CEA) adalah kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil Belanda dan mitranya di selatan untuk mengadvokasi pembangunan inklusif.



MASA KERJA
2016-2020



WILAYAH KERJA
13 negara
+
79 organisasi masyarakat sipil



LEGASI
8.696



ABOUT US:
Film pendek tentang CEA dapat diakses dengan scan QR Code ini:



13 Negara, 79 OMS, 8.696 jejak

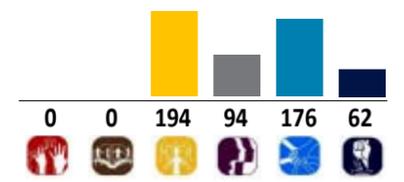
Bekerja di 13 negara dari 2016 sampai 2019, CEA meninggalkan tak kurang 8.696 jejak.



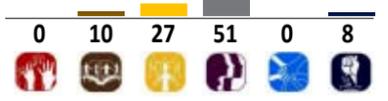
INDIKATOR

- Jumlah undang-undang, kebijakan, dan norma untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif
- Jumlah undang-undang, kebijakan, dan norma/sikap yang diblok, diadopsi, atau ditingkatkan untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif
- Saat organisasi masyarakat sipil berhasil menciptakan ruang untuk tuntutan dan posisi mereka melalui pengaturan agenda, mempengaruhi debat, dan/atau menciptakan ruang untuk terlibat
- Inisiatif advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk/oleh/dengan anggota konstituentnya
- Organisasi masyarakat sipil meningkatkan kapasitas lobi dan advokasi
- Organisasi masyarakat sipil berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan oleh Aliansi dan mitranya

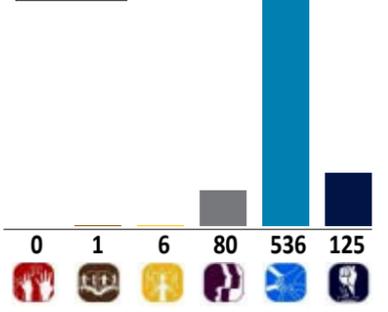
Guatemala dan Nicaragua:
SODEJU, Frente Nacional de Juventud (FNJ), AMPB, MTC



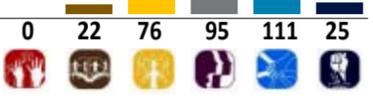
Belanda/Uni Eropa:
ICCO Cooperation, CNV Internationaal, Edukans, Kerk in Actie, Prisma, Wilde Ganzen Foundation, Woord en Daad, Agriprofus, MVO Platform, Partos, Wo=Men, IDH, VBDO/Human, ACT EU, ACT Alliance, FIAN International



Bangladesh:
Nijera Kori, Helvetas Bangladesh, TLMB, CSA for Sun, Rtf Bangladesh



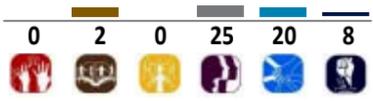
Benin:
DEDRAS, AKB, PASCIB, dan COSI



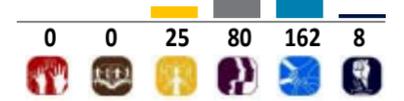
Bolivia:
Manqu'a, IPDRS, CERDET, CBDE



Kamboja:
GRET, EC, CLEC, NTFP, CLC, CAWF, CIPO, LFTW, FAPD



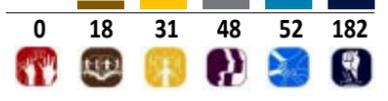
Myanmar:
NAG, CESD, KNMS Yangoon, Rattana Metta Organization (RMO), Radanar Ayar Development Association (RDA)



Ethiopia:
EKHC-DC, WKHC-TDA, EUCORD, FC (Facilitator for Change), HUNDEE, OSRA, AFP



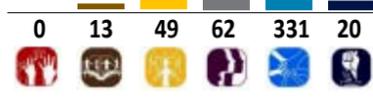
India:
VANI, VHAI, SRIJAN, Save the Children



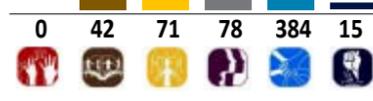
Indonesia:
Konsil LSM, Penabulu, PKPA, HUKATAN, KPSHK, SPKS, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)



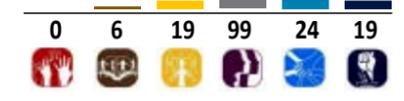
Kenya:
KCDF, AYT, KAACR, USK, ADS-W



Mali:
AMASSA, OMAES, CAEB



Uganda:
COU-TEDDO, FAPAD, SAO, PAG-Soroti, ADP, NGO Forum, Advance Africa (AA)



ELLY URBAN, Program Manajer CEA Global

“Terima Kasih atas Dedikasi dan Kerja yang Telah Rampung”

SAYA sangat bersyukur atas program di Indonesia. Saya telah menyaksikan dari awal, dan saya juga melihat pada mulanya sedikit sulit mene-

Hal yang juga sangat menyenangkan dilihat adalah kerja di bidang hak anak.

mukan fokus yang sebenarnya dalam lobi dan advokasi, tapi dalam perjalanan waktu Anda saya pikir telah mencapai hasil yang baik dan mengesankan.

Misalnya dalam memberdayakan posisi petani kecil (*smallholder farmer*) dan juga dalam kerja sama dengan CNV dan serikat kerja membenahi kondisi di sektor

sawit. Hal yang juga sangat menyenangkan dilihat adalah kerja di bidang hak anak.

Saya ke Indonesia sekali ketika ada pelatihan dan saya sangat ingat perjalanan ke pulau Bangka, tempat kami bertemu semua mitra dan kami melakukan diskusi yang menarik, juga ekskursi ke beberapa perusahaan, dan saya ingin berterima kasih atas semua dedikasi dan kerja yang telah Anda rampungkan.

Saya berharap setelah kini programnya selesai Anda akan menemukan jalan untuk melanjutkan kerja sama, dan meneruskan kerja-kerja lobi dan advokasi; mengawasi pemerintah, mengawasi sektor swasta, demi kebaikan semua petani dan pekerja kecil di Indonesia.



Indonesia di Jalur Tiga dan Empat

Program CEA didasarkan pada teori pendekatan perubahan. Seluruhnya ada empat pathways (jalur) perubahan. Setiap negara harus memilih setidaknya dua jalur. Indonesia memilih jalur 3 dan 4.



Sembilan Organisasi

<p>Komunitas, serikat pekerja, dialog sosial, terutama terkait hak anak, komunitas pedesaan dan hak asasi manusia</p>	<p>Lobi berbasis komoditas, terutama berkaitan dengan komoditas rempah-rempah, padi, minyak-kelapa sawit</p>	<p>Tanggung jawab sosial perusahaan (perusahaan internasional dan lokal)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Jalan ke-3

PERNYATAAN MASALAH

- Kurangnya kebijakan yang mendukung rantai nilai yang berkelanjutan untuk produsen dan usaha kecil.
- Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pasar.
- Kurangnya modal kerja untuk input.
- Tidak ada organisasi dan dukungan untuk petani, kualitas produk rendah akibat kurangnya pengetahuan teknis dan praktik pertanian yang buruk.
- Posisi petani kecil dalam rantai pasok lemah.



INTERVENSI PROGRAM

Pemangku Kepentingan Kunci: DRI Pusat/lokal, APLI, AELI, IDH, KADIN, Penabulu, KpSHK, SPKS

- Lobi & Advokasi: kerja sama Dewan Komoditas Rempah, IDH, melobi kamar dagang UTZ untuk akses keuangan, penyempurnaan kebijakan pemerintah tentang pengembangan pasar, SNI
- Pengembangan Kapasitas: peningkatan kapasitas CSO (DRI Pusat/lokal, APLI, AELI) dan sektor swasta tentang praktik pertanian yang baik dan fasilitasi pasar dan OD

- Pertemuan DRI untuk mendorong responflatoxin
- Menambah 2 mitra baru berdasarkan kebutuhan CEA (terkait dengan isu perubahan iklim dan lingkungan)
- Koneksi lokal (provinsi) ke Dewan Komoditas

HASIL

Perubahan kebijakan yang menguntungkan yang memungkinkan akses inklusif dan berkelanjutan ke pasar di 3 komoditas. Sektor swasta mengubah cara mereka menjalankan bisnis.

Perubahan:

- L&A langsung ke kementerian karena dewan rempah-rempah tidak terlalu aktif.
- "Portofolio" rempah-rempah mengurangi risiko di pasar internasional.
- Jaringan SSI (Sales Services International).



PERUBAHAN PERILAKU

Organisasi masyarakat sipil dan dewan komoditas menerapkan pengetahuan untuk lobi dan advokasi di pasar inklusif untuk mendukung kelompok tani. Organisasi masyarakat sipil dan dewan komoditas mewakili kepentingan usaha produsen skala kecil dan untuk partisipasi pasar yang inklusif dan berkelanjutan, terlibat dalam L & A, pengambilan keputusan, dan dialog kebijakan pada komoditas tersebut.

- Pertemuan IDH untuk pembentukan SSH Indonesia
- Konsultasi dengan DRI untuk keterkaitan dengan SSI IDH
- Lokakarya beras nasional (oleh KRKP)
- Penyusunan kebijakan pengendalian mutu dengan Ditjen Perkebunan
- Pemerintah mengundang CSO untuk konsultasi penyusunan regulasi

PERUBAHAN KAPASITAS

CSO telah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang fasilitasi pasar inklusif, OD dan GAP, sektor swasta, pemerintah.

Dewan Komoditas (DRI, APLI, IDH, UTZ) memiliki pengetahuan tentang fasilitasi pasar inklusif, meningkatkan daya tawar mereka terhadap pemerintah. Dan Dewan Komoditas telah mengeluarkan standar indikator kinerja produksi dan distribusiko moditas.

- FGD *multi-stake holder* pengendalian mutu pala
- Peningkatan anggota kelompok pala nasional
- Peta komoditas hasil kawasan perhutanan sosial dan hasil hutan bukan kayu
- Kelengkapan peraturan mitra

CAPAIAN

Penerima manfaat: Kelompok tani rempah-rempah memiliki standarisasi produksi komoditas, OMS meningkatkan kapasitas pengorganisasian kelompok tani, peningkatan produksi, perbaikan manajemen pengelolaan organisasi kelompok tani dan fasilitasi pasar.

Target lobi: Pengurus komoditas mempunyai kapasitas untuk menjalankan fungsinya secara efektif, pemerintah mendukung dengan kebijakan yang menguntungkan; kamar dagang, sektor publik bersedia bekerja sama dengan kelompok tani yang komoditasnya terstandarisasi, biro sertifikasi, pemerintah (KLHK, Kementan, Pemprov, Pemdes)

Penerima manfaat:

- Panduan video pascapanen pala;
- Eksposur penyedia layanan oleh OMS dalam Jejaring Konsumsi Berkelanjutan yang berkelanjutan



KELUARAN

Agenda kegiatan bersama dengan dewan komoditas dan kamar dagang untuk topik lobi tertentu (akses keuangan, pengembangan pasar, kebijakan pemerintah dan standarisasi produksi komoditas, produksi berkelanjutan dan adil), program ekonomi di kawasan K sektor swasta HK.

Organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta, dilatih untuk memahami kepentingan pengusaha produsen skala kecil, fasilitasi pasar inklusif dan GAP.

Keluaran 1:

- Komunikasi dalam aliansi yang dibentuk dengan INOBU tentang perdagangan tradisional (antar-provinsi)
- Menangani post-complain dari Kanada dan pembeli UE
- Konsultasi dengan pembeli baru dari Kanada tentang pembeli khusus.

Keluaran2:

- Lobi kepada perusahaan nasional untuk menghubungkan petani kecil dengan pasar produk jamu organik.

DAMPAK

Produsen kecil telah meningkatkan produksi melalui implementasi standar komunitas, meningkatkan pendapatan, perlindungan/jaminan dari kebijakan.





PATHWAY **3**

Untuk Petani yang Lebih Berkemampuan

Di Indonesia, program Civic Engagement Alliance (CEA) berupaya mewujudkan perubahan kapasitas dan perilaku organisasi masyarakat sipil, dewan komoditas, sektor swasta, dan pemerintah. Ujungnya, sesuai dengan Pathway 3 dari Theory of Change-nya, adalah ada tindakan-tindakan yang berguna bagi pemberdayaan petani kecil, di antaranya pengadaan fasilitas bagi pasar yang inklusif, produksi komoditas yang memenuhi standar, pengembangan organisasi, dan praktik pertanian yang baik. Bagaimana pengalaman mitra-mitra pelaksana? Bagaimana pula program ini mengubah kebiasaan?



Bertahun-tahun pemerintah tak punya alat yang terintegrasi untuk memantau dan mencatat kualitas produk rempah. Padahal ini penting untuk mengakses pasar.

Mewujudkan Rempah Berkualitas

Bertahun-tahun rempah Indonesia tak bisa memasuki pasar Uni Eropa. Atau, kalau pun masuk, harus berliku-liku. Penyebabnya? Rempah yang dihasilkan Indonesia dinilai tak memenuhi standar kualitas internasional.

Penolakan pasar itu rupanya berkaitan dengan keterlambatan dalam penanganan pascapanen.

Di Indonesia, perdagangan rempah memiliki sejarah panjang—sejak sebelum

masa kolonial Belanda. Di masa modern ini permintaan dari berbagai pasar terus tumbuh. Ini termasuk di negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Sebagian dari penyebabnya adalah bertambahnya populasi etnis dan meningkatnya minat terhadap masakan etnis.

Halangan dalam memanfaatkan perkembangan baik itu ada bertahun-tahun karena pemerintah tak punya alat yang terintegrasi untuk memantau dan mencatat kualitas produk rempah Indonesia. Komoditas rempah memang memiliki rantai nilai yang panjang. Distribusi informasi tentang standar di antara pihak-pihak dalam rantai itu tidak merata. Padahal tuntutan adalah standar tertentu mesti diterapkan, mengingat rempah merupakan komoditas global. Akses pasar harus dibuka.

Ketika program Civic Engagement Alliance (CEA) diluncurkan, situasi tersebut diang-



gap sebagai momentum. Peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, secara khusus dengan direktorat jenderal yang mengurus kualitas dan standardisasi serta Direktorat Jenderal Perkebunan, juga dengan Dewan Rempah Indonesia (sejak 2018), menjadi terbuka.

Yayasan Penabulu bergabung dengan program CEA pada 2017. Fokusnya, menurut Eko Komara, Direktur Eksekutif Penabulu, adalah kesejahteraan petani rempah melalui intervensi peningkatan penjamin mutu dan keterlacakan komoditas rempah, khususnya

Sebagai bagian dari intervensi dalam program, riset diperlukan untuk memulai dibuatnya pedoman standar komoditas—dalam hal ini rempah.

pala, lada, dan kayu manis. Hal ini, “Diharapkan mampu mendorong *fair trade* dan *sustainable market* bagi komoditas rempah industri,” katanya.

Eko menjelaskan intervensi dalam program tersebut secara garis besar adalah riset mengenai standar komoditas, melobi Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian serta menjalin kerja sama menyusun prosedur operasi standar penjaminan

mutu, dan bersama dengan para pihak mencoba mengawali pengadaan platform digital yang berkemampuan mendokumentasikan data. Tiga wilayah yang menjadi lokasi kerja adalah Maluku Utara (pala), Bangka (lada), dan Kerinci (kayu manis).

Untuk pengembangan SOP di bidang rempah, bersama ICCO Cooperation, Penabulu menyediakan dukungan teknis. Agar penerapan standar ini bisa dipastikan di tingkat yang mana pun, keduanya juga menyarankan dibuatnya sistem keterlacakan digital. Yang hendak dicapai: penguatan kebijakan jaminan mutu; pengembangan manajemen sistem informasi yang terintegrasi dalam perdagangan rempah; dan pengembangan area model di bidang pala, lada, kayu manis, serta tanaman obat pilihan.

Berkaitan dengan platform itulah dikembangkan apa yang dinamai Dakota atau Data Komoditas Terpadu. Platform ini dirancang memiliki kemampuan mendokumentasikan keterlacakan proses, dari budi daya hingga penanganan pascapanen, juga mendokumentasikan praktik baik sesuai standar yang dibangun sebelumnya bersama Direktorat Jenderal Perkebunan. “Dakota,” kata Eko, “kemudian menjadi bagian dari instrumen untuk menjamin aplikasi internal control system di masing-masing komoditas.”

Lobi demi mewujudkan tujuan tersebut berlangsung antara Maret 2019 dan Agustus

Keterlacakan digital berguna untuk menguatkan kebijakan penjaminan mutu dan pengembangan manajemen sistem informasi terpadu (kiri), juga pengembangan area model di bidang rempah (kanan).



2020. Prosesnya bisa berlangsung formal maupun informal.

Di awal, dua pihak yang terhitung penting bisa digandeng adalah Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dewan Rempah Indonesia. Untuk meneguhkan keputusan Direktorat kala itu, yang akan mengkaji ulang peraturan dan standar yang ada, Penabulu mempresentasikan hasil studi CEA tentang kesesuaian standar yang berlaku di Indonesia dengan standar internasional dan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bisnis dan hak asasi manusia atau United Nations Guiding

Pala termasuk rempah yang perdagangannya memiliki sejarah panjang dan bahkan berdarah-darah. Buah yang telah dibelah (kiri); buah yang terdapat di pohon (kanan).



Principles on Business Human Rights (UNGP).

Persetujuan akhirnya dicapai antara Penabulu, Dewan Rempah Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk membuat SOP pengelolaan kualitas pala dan komoditas rempah lainnya. Ini lalu diikuti dua perusahaan swasta, yakni PT Cinquer Agro Nusantara (CAN) dan PT Alamsari Interbuana, yang menyatakan berminat mengembangkan sistem keterlacakan produk. Dari sini segalanya pun bergerak maju.

Pada Desember 2019, draf SOP untuk pala rampung serta disetujui Dewan Rempah Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dakota juga akhirnya bisa dipresentasikan di Dewan Rempah Indonesia. Pada Januari 2020 diselenggarakanlah

lokakarya untuk mengenalkan petani dengan standar itu.

Eko menuturkan program CEA mengubah cara dan pola kerja advokasi Penabulu dan menumbuhkan keyakinan bahwa kolaborasi kemitraan dengan pemerintah, baik pusat dan daerah; sektor swasta; dan komunitas dapat dilakukan dan memang harus dilakukan. "Itu yang menjadi pelajaran penting bagi kami," katanya.

Dengan selesainya CEA sebagai program, perihal keberlanjutan dari apa yang telah dilakukan mau tak mau mengemuka. Untuk hal ini, Eko memastikan Penabulu akan terus berusaha menjadi mitra Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mengembangkan sistem jaminan mutu bagi komoditas rempah yang lain. Hal ini akan meliputi aspek budi daya maupun penanganan pascapanen, juga keterkaitannya dengan Dakota. Penabulu akan bekerja sama pula dengan pemerintah daerah atau pemangku wilayah seperti kesatuan pengelolaan hutan, juga perusahaan pembeli lokal yang "biasanya memiliki binaan atau kelompok dampingan" di wilayah yang memasok komoditas mereka.

Harapannya adalah keterlacakan dan jaminan mutu bisa ditingkatkan sehingga, kata Eko, "CEA tidak berakhir sampai di sini."

Penabulu

DIDIRIKAN di Jakarta pada 2002, Yayasan Penabulu mendukung kerja *civil society organization* atau organisasi masyarakat sipil (CSO) di Indonesia. Bidang-bidang strategis yang digelutinya termasuk pembangunan inklusif, pasar yang berkelanjutan, teknologi informasi dan komunikasi, dan manajemen pengetahuan.

Dalam kerangka Pathway 3, Penabulu berfokus kepada pengembangan standar rempah dan Dakota serta penerapannya. Dakota adalah sistem teknologi informasi untuk mengintegrasikan data komoditas rempah dengan dukungan bagi keterlacakan komoditas. Penabulu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian, Dewan Rempah Indonesia, kantor dinas pertanian di provinsi Maluku Utara.

Penabulu juga memfasilitasi lokakarya tentang uji tuntas hak asasi manusia untuk komisi pembangunan desa dan bisnis (terkait Pathway 4), juga mengkoordinasikan sejumlah studi di sektor rempah dalam kerangka program Civic Engagement Alliance.

Penabulu berfokus kepada pengembangan standar rempah dan Dakota serta penerapannya.





Standar internasional menuntut kualitas yang sering tak bisa dicapai. Petani perlu bantuan untuk menaikkan posisi tawar.

Hadirnya Platform **DAKOTA***

* www.dakota.directory

Tidak ada yang terhindar dari disrupsi teknologi informasi, termasuk bidang pertanian. Keharusan merespons hal itu, mengakomodasi urgensinya dalam kegiatan pertanian untuk menyongsong era industri 4.0, tak bisa diabaikan. Sebagian alasan lahirnya DAKOTA atau Data Komoditas Terpadu adalah kondisi baru tersebut.

DAKOTA menghadirkan data visual, memperkenalkan profil petani rempah, mendekatkan konsumen dengan produk petani, juga memberikan informasi kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan standar rempah.

Dapat digunakan di daerah dengan sinyal



Perlu upaya bahu-membahu untuk bisa membenahi standarisasi mutu.

lemah, DAKOTA menggunakan konektivitas jaringan berbasis *internet of things*-sistem yang terdiri atas obyek yang saling ber-

hubungan dan terkoneksi dengan internet, yang berkemampuan mengumpulkan dan mentransfer data pada jaringan nirkabel tanpa campur tangan manusia.

Ide tentang DAKOTA timbul berbarengan dengan proses pembuatan prosedur operasi standar atau *standard operating procedure* (SOP) pengelolaan kualitas pala dan komoditas rempah lainnya. Pembuatan SOP ini dilakukan bahu-membahu antara Dewan Rempah Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan dua perusahaan swasta,

Pengumpulan data terkadang memerlukan forum yang mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan (kiri). Berbagai cara dimanfaatkan untuk hasil yang lebih baik (kanan).

PT CinquerAgro Nusantara dan PT Alamsari-Interbuana. Tujuannya untuk membenahi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap standardisasi mutu.

Pembenahan yang dilakukan melalui program Civic Engagement Alliance (CEA) itu dianggap penting agar Indonesia tak tertinggal dari pesaingnya dalam memenuhi tingginya permintaan global.

Sebetulnya, atas instruksi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, telah ada gerakan tiga kali ekspor atau Grati eks. Tapi, meski berguna, terutama dalam jangka panjang, Grati eks tak sampai mengurus problem dalam rantai nilai yang justru menghambat ekspor rempah, khususnya ke Uni Eropa.



0,8162N 127,3607E
Dufa Dufa
Ternate Utara
Kota Ternate
Maluku Utara
kebun pala Amir Yasim
16 Aqt 2020 10 47 43

DAKOTA Indonesia
Digital Market Integration **Spice Farmers**

Unique

Dakota visualizes the spicy supply chains to become more transparent by promoting inclusive business.

Dakota will help farmers to have an economic identity, tracks their records to improve their financial access, register on broadband making the spice distribution more reliable, verify sellers, and helps boost bargaining power.

DAKOTA memvisualisasikan rantai pasok rempah-rempah. Mendorong bisnis lebih transparan bagi petani.

Hal ini berkaitan dengan tuntutan kualitas sesuai standar internasional.

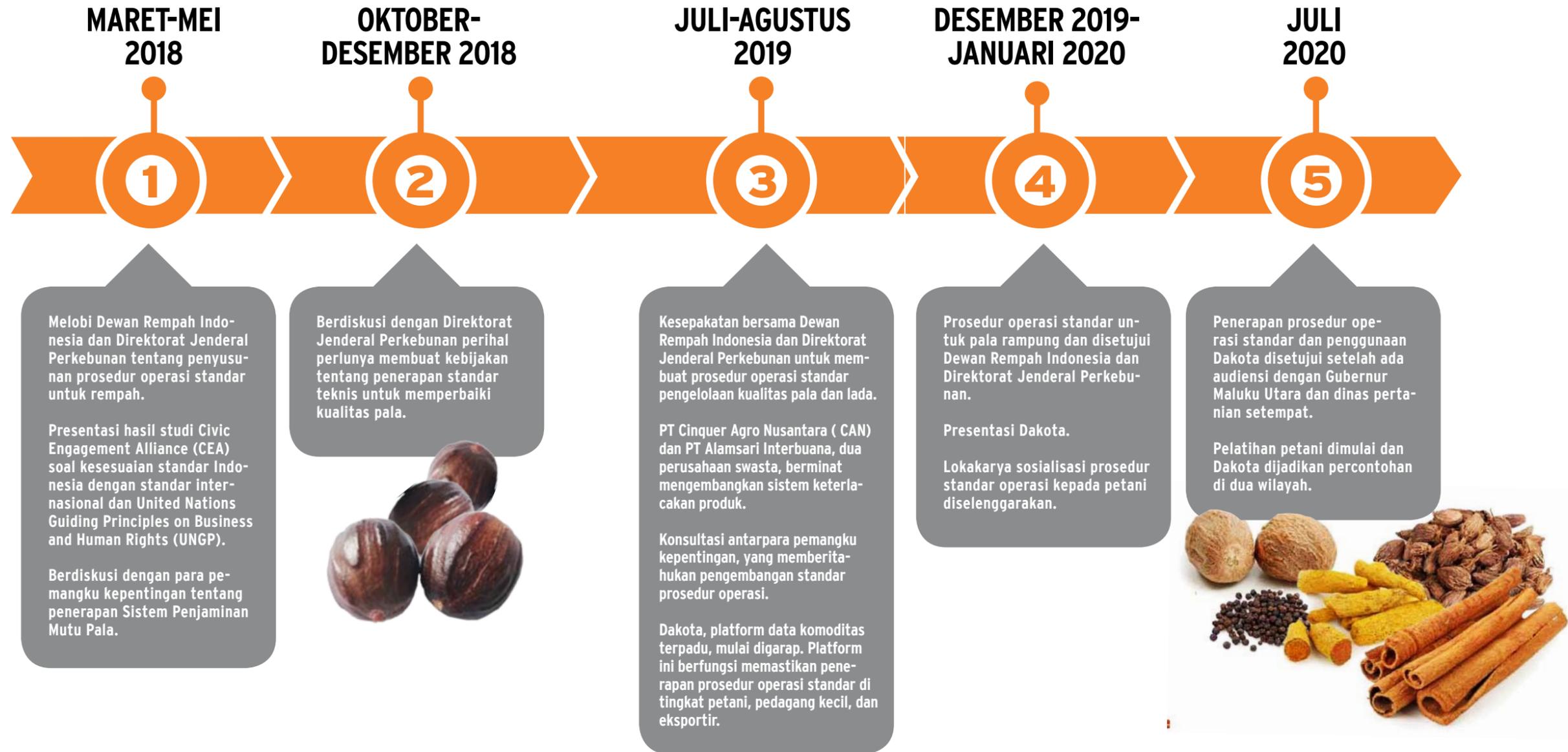
Sebagai alat kontrol, berbasis *web*, buah pengembangan dari hasil lobi dan advokasi, DAKOTA berfungsi memastikan penerapan standar di tingkat petani, pedagang kecil, serta eksportir, dan melacak sumber bahan baku maupun kota atau negara tujuan komoditas rempah yang diperdagangkan.

Di samping membantu petani mencapai kualitas produk sesuai standar internasional, DAKOTA pada gilirannya juga meningkatkan posisi tawar petani. Dengan begitu, petani

dapat meningkatkan pendapatannya.

Menimbang kegunaannya, yang terhitung inovatif, DAKOTA terpilih sebagai satu dari 30 *platform* yang memenuhi kriteria Most Inspiring Digital Inovations. Penyelenggaranya, Spindle, adalah inisiatif yang menghubungkan inovator di Belanda dengan para pelaku global dalam gerakan *online* maupun *offline* untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tonggak Proses Lobi





Masyarakat adat termasuk tumpuan bagi konsep perhutanan sosial, sebuah cara mendemokratisasi pengelolaan hutan.

Atas Nama Demokratisasi di Hutan

Konsep perhutanan sosial sesungguhnya merupakan demokratisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Substansinya, sebagaimana yang lazim terdapat dalam pengertian demokrasi, adalah mengakomodasi partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah mengelola hutan sesuai fungsinya—apakah itu hutan produksi atau hutan lindung.

Resmi mulai dilaksanakan pada 2016, berdasarkan Peraturan Menteri No. 83 tentang Perhutanan Sosial, perkembangannya sejauh ini belum sepenuhnya membesarkan hati.

Di samping masih kecilnya total luas hutan yang dikelola masyarakat (5 persen), profil yang jelas mengenai potensi produk yang bisa dikembangkan pun belumlah gamblang.

Perkara betapa minim luas yang dikelola telah ada langkah yang diambil untuk meningkatkannya, walau realisasinya, hingga menjelang batas waktunya (lima tahun sejak 2016), masih tersendat juga. Akan halnya profil mengenai potensi produk, terutama nonkayu dan yang berkaitan dengan pengembangan



Demi mendapatkan pengetahuan lapangan yang cukup sebagai bekal untuk melakukan lobi dan advokasi, digandenglah Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) pada 2019. Tugas yang dipercayakan kepada organisasi jaringan yang peduli terhadap persoalan sumber kekayaan alam, khususnya hutan, ini adalah melakukan riset.

Berlangsung setahun, riset bertema “Mendukung Pengembangan Usaha di Unit Wilayah Hutan Kerakyatan” dilakukan di lima unit perhutanan sosial. Unit-unit ini terdapat di Kalimantan Barat (Hutan Kemasyarakatan Beganak, Kabupaten Sekadau), Sulawesi Tenggara (Hutan Kemasyarakatan Sakuli, Kabupaten Kolaka), Jambi (Hutan Hak Adat Tigo Luhah, di Desa Kemantan dan Desa Pungut

Mudik, Kabupaten Kerinci), Bengkulu (hutan kemasyarakatan di Desa Tebat Monok dan Desa Kelilik, Kabupaten Kepahiang), dan Jawa Timur (Dataran Tinggi Hyang Argopuro, Jember).

Program yang didukung ICCO Cooperation ini, “Lebih berfokus kepada identifikasi non-timber forest products, terutama komoditas rempah di kawasan hutan dalam skema perizinan perhutanan sosial,” kata Muhammad Djauhari, Direktur Eksekutif KpSHK. Identifikasi itu meliputi Sasarannya adalah pemegang izin perhutanan sosial.

Hutan tak hanya menghasilkan kayu. Beberapa produk nonkayu bisa dan telah dibudidayakan di hutan-hutan di Indonesia. Identifikasinya yang lengkap berguna untuk pembuatan kebijakan (kiri). Studi literatur merupakan bagian dari riset untuk melakukan hal itu (kanan).

Pengetahuan yang cukup merupakan bekal penting dalam lobi dan advokasi. Mitra yang tepat berguna dalam hal ini.

bisnis atau usahanya, memang belum ada gambaran dan upaya yang konkret. Untuk beberapa komoditas rempah, umpamanya, perdagangannya sebetulnya sudah berlangsung; Indonesia bahkan tergolong pemain utama di pasar Eropa. Hanya saja upaya terpadu untuk mengembangkan bisnis komoditas itu masih jauh panggang dari api.

Hal itulah isu yang menjadi perhatian dalam program Civic Engagement Alliance (CEA).



Beberapa potensi komoditas rempah yang diidentifikasi dan dikaji dari riset tersebut adalah kayu manis (di Kerinci), lada dan pala (di Kepahiang), dan cengkik (di Kolaka). Untuk hasil hutan nonkayu ada kopi (di Kerinci, Kepahiang, dan Jember), karet dan damar (di Sekadau).

Menurut Djauhari, di antara temuan yang didapat, untuk produk-produk nonkayu, terutama rempah, memang belum tercatat di tingkat pemerintah. "Karena selama ini kawasan hutan 'kan menghasilkan kayu. Padahal faktanya, terutama di lima lokasi kajian kami, justru ada produk pertanian dan perkebunan yang sama dengan yang dikembangkan di kawasan bukan hutan," katanya.

Temuan riset menjadi bahan untuk menyelenggarakan lokakarya (kiri) dan seminar (kanan), yang lalu menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan (kiri).

Selain menjadi pangkalan data (*database*), temuan-temuan yang didapat lalu dijadikan bahan lokakarya. Dari lokakarya pada 20 November 2019 inilah dibuat rekomendasi kebijakan tentang komoditas dan pasar produk perhutanan sosial—meliputi pengembangan potensi komoditas, dukungan kapasitas kelembagaan petani hutan, peningkatan pengolahan pascapanen., dan jaminan pasar serta harga bagi kelompok usaha petani hutan.

Waktu setahun, tentu saja, membatasi. Yang didapat, juga yang dialami KpSHK, "Mungkin baru tahap awal," kata Djauhari. Tapi, secara lobi dan advokasi, program CEA memberikan jalan, terutama bagaimana berfokus kepada komoditas-komoditas pertanian-perkebunan di kawasan hutan.

KpSHK melihat tindak lanjutnya yang penting. Pencatatan, yang masih luput men-

cakup komoditas di kawasan hutan, umpamanya, sangat penting dilakukan. Ini bahkan mesti mendahului hal-hal lain seperti upaya meningkatkan akses pasar, pembenahan kualitas, kegiatan kemitraan, dan lain-lain.

Setelah setahun terlibat dalam program CEA, Djauhari melihat KpSHK kini mulai bisa mengubah strategi. Dulu, menurut dia, KpSHK lebih berfokus kepada bagaimana memperluas dan mempercepat perizinan pengolahan hutan oleh masyarakat. Kini, "Mengisi pasca-izinnya," katanya.

Di situ kesejahteraan bisa dicapai, demokratisasi secara nyata diwujudkan.

KpSHK menjadi motor penggerak yang mendukung metode pengelolaan hutan yang sistematis.

KpSHK

Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan adalah jaringan organisasi yang didirikan pada 1997 berdasarkan inisiatif beberapa organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat adat, peneliti, dan individu. Para pendiri disatukan oleh hal yang sama: keprihatinan terhadap masalah-masalah sumber daya alam, khususnya hutan, di Indonesia.

Sejak dicanangkan keberadaannya, KpSHK menjadi motor penggerak yang mendukung metode pengelolaan hutan yang sistematis yang dipraktikkan masyarakat adat dan komunitas lokal di dalam dan di sekitar hutan. Metode ini telah dikembangkan dari generasi ke generasi. Anggota KpSHK kini terdiri atas 37 organisasi.

Dalam kerangka Pathway 3, pada 2019, KpSHK ditugasi melakukan riset pasar dengan tema "Mendukung Pengembangan Bisnis dalam Unit Sistem Hutan Kerakyatan". Dilaksanakan di lima lokasi yang tersebar di lima provinsi (Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur), riset ini menunjukkan pentingnya hutan rempah.





Akses kelola hutan membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk hidup lebih sejahtera.

Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari untuk kesejahteraan seraya menjaga keseimbangan lingkungan—menurunkan dan mengurangi emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016, sistem ini dijalankan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 peraturan itu, adalah untuk “meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya”.

Wujud pengelolaannya bisa berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanam-

an rakyat, hutan rakyat, hutan adat, atau kemitraan kehutanan.

Dengan kata lain, perhutanan sosial adalah pemberian akses kelola kepada masyarakat terhadap kawasan hutan.

Harapannya: masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan bisa hidup lebih sejahtera.

Bagaimana hal itu bisa terealisasi? “Kuncinya,” kata Eko N. dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA), Direktorat Jenderal Perhutanan

Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mewakili Direktur Jenderal BUPSHA Tjiptono dalam lokakarya Potensi Komoditi Rempah (dan Hasil Hutan Bukan Kayu) Mendukung Pengembangan Usaha di Unit Wilayah Sistem Hutan Kerakyatan, “adalah di pengembangan usaha.”

Dengan kata lain, perhutanan sosial adalah pemberian akses kelola kepada masyarakat terhadap kawasan hutan.



Produksi beras berkelanjutan adalah keniscayaan demi petani yang sejahtera. Perlu platform standar beras nasional.

Demi Beras yang Lestari dan Petani yang Sejahtera

Ada masanya, dulu, keadaan ini berlaku di Indonesia: bahwa makanan pokok bukan hanya beras. Di beberapa wilayah orang mengonsumsi bahan pangan yang memang khas dan terdapat secara lokal.

Kini gambaran itu tinggal terdapat di buku-buku pelajaran lama—ini pun kalau buku-bukunya masih bisa ditemukan. Satu-satunya makanan pokok yang ada,

berkat program intensifikasi dan ekstensifikasi pada masa Orde Baru, adalah beras. Masalahnya, seiring dengan kian meningkatnya konsumsi, produksinya justru semakin sulit dinaikkan. Swasembada, yang tak henti-hentinya digaungkan, bertahan hanya di cita-cita. Padahal, dari sisi lain, ada 13 juta petani padi yang menggantungkan hidup. Problemnnya: sumber daya yang bertambah terbatas, juga makin banyak yang rusak, serta ancaman perubahan iklim.

Di antara hal-hal yang mengganjal upaya meningkatkan produksi beras secara lestari atau berkelanjutan adalah belum adanya platform bersama dari para aktor yang bisa menjadi rujukan; para aktor bermain sendiri-sendiri, tanpa koordinasi; dan relasi yang dibangun cenderung tak berkelanjutan dalam satu rantai nilai usaha. Ini masih ditambah pemerintah yang tak efektif dalam



Produksi beras juga harus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Secara global telah ada Sustainable Rice Platform atau platform perberasan yang lestari.

mensinergikan dan melindungi para aktor, sebab kebijakan yang bisa menjadi dasar juga belum ada.

“Sampai saat ini di sektor perberasan, yang merupakan megasektor yang sangat terkait dengan urusan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, belum ada platform khusus, belum ada kelembagaan khusus yang mengayomi beras,” kata Lily Batara, Manajer Program Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP).

Begitulah temuan KRKP ketika mencoba membangun dialog dengan para pihak

berkaitan dengan proyek pengembangan platform dan Standar Beras Berkelanjutan atau Sustainable Rice Platform (SRP). Ini proyek dalam kerangka program Civic Engagement Alliance (CEA), antara September 2019-Juni 2020 (diperpanjang hingga Desember 2020 karena pandemi), yang bertujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani kecil di Indonesia. SRP merupakan standar global untuk menjamin

pengurangan dampak bagi lingkungan dalam produksi beras dan peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan hasil dialog tersebut, dipandang penting adanya platform standar beras yang bisa menjamin produksi berkelanjutan, juga kemitraan perberasan nasional. KRKP memulai upaya membangun platform SRP Indonesia dengan studi dokumen. Ini, menurut Lily, merupakan “ pijakan dasar”. Hasilnya, dalam bentuk draf makalah kebijakan atau *policy brief*, kemudian didiseminasikan ke beberapa pihak, beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan rantai nilai beras.

Dengan draf *policy brief* yang diper-

baiki, berdasarkan masukan dari berbagai diskusi dengan beberapa pihak, para ahli serta akademisi, juga para pelaku di rantai nilai beras, kegiatan lobi dan advokasi pun dijalankan. Di sektor pemerintah, yang terutama menjadi target adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Forum diskusi dan webinar, bahkan upaya kampanye melalui iklan, unggahan di media sosial, materi podcast, tanya-jawab dalam siaran radio bekerja sama dengan

Selain jaminan produksi yang berkelanjutan, platform standar juga menjamin kemitraan antarpelaku perberasan.



Radio Republik Indonesia Pro 4, digencarkan. Tak kurang dari itu adalah diskusi yang diselenggarakan di Ngawi, melibatkan organisasi nonpemerintah lokal, kelompok tani, Dinas Pertanian, dan sektor swasta. Sampai November 2019, menurut Lily, para pihak sudah mengetahui pesan mengenai pentingnya mewujudkan kemitraan perberasan nasional.

Puncak dari semua rangkaian kegiatan tersebut adalah webinar tentang kemitraan perberasan nasional pada 13 November 2020. Terselenggara berkat kerja sama Ke-

Pesan tentang pentingnya platform beras berkelanjutan telah luas disebarkan, termasuk di kalangan kelompok tani. Masih perlu standar operasional bagi nilai-nilai fundamental dalam rancangan platform itu.

menko Bidang Perekonomian dengan KRKP, forum ini mengumpulkan para pemangku kepentingan di bidang terkait. KRKP melihat inilah peluang untuk memastikan keberlanjutan gagasan mengenai realisasi kemitraan. Dari sini lalu dikirimkan *policy brief* kepada 46 pihak. "Kami berharap ini menjadi *sustainable* ke depannya dan sampai pada akhirnya bisa menghasilkan satu kelembagaan perberasan yang merangkum banyak pihak," kata Lily.

Proses memang belum rampung. Kelembagaan yang dimaksud belum terwujud. Begitu pula standar yang mau disepakati-platform dan kemitraan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Ini pekerjaan rumah.

Pencapaian proyek, menurut Lily, belum 100 persen, mungkin sekitar 78 persen. Meski demikian, "Nilai-nilai prinsipal dalam platform beras berkelanjutan sudah kami masukkan, tinggal standar operasionalnya yang mungkin masih harus didiskusikan, yang akan dikoordinasikan langsung oleh Kemenko," katanya.

Bagi KRKP, sebagai pembelajaran, seperti dikemukakan dalam laporan akhirnya, proses lobi dan advokasi yang telah dijalankannya berguna meningkatkan kapasitas lembaga--dalam lobi dan advokasi, tentu saja. Semula KRKP lebih banyak melakukan advokasi di sektor pemerintah. CEA menjadikan KRKP sanggup melakukan hal yang sama di sektor swasta.

Di samping itu, KRKP makin diakui pemerintah, sektor swasta, akademisi, juga masyarakat pada umumnya. Pencapaian ini bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dengan kedua hal itu, misi organisasi menjadi lebih kuat, khususnya dalam upaya mendorong rantai nilai pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi petani. Yang juga bertambah kukuh adalah jaringan dengan para pihak dalam rantai nilai pangan padi-beras.

KRKP

DILAHIRKAN pada 2003, Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan adalah koalisi strategis dari organisasi petani, organisasi nonpemerintah, dan jaringan organisasi nonpemerintah yang menaruh perhatian kepada masalah-masalah pertanian, petani, dan pangan.

Sejak awal, KRKP bertujuan mengkoordinasikan sebuah gerakan yang berfokus kepada kedaulatan pangan rakyat dan mempromosikan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman di antara berbagai organisasi akar rumput, organisasi nonpemerintah dan jejaringnya, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lain. Semua ini dilakukan demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, KRKP menjunjung prinsip nonpartisan, persamaan dan keadilan sosial, keberagaman, keberlanjutan, dan sumber daya lokal. Jaringan KRKP beranggotakan 49 organisasi dan inisiatif.

Dalam kerangka Pathway 3, KRKP terlibat dalam penyusunan Platform Beras Berkelanjutan atau Sustainable Rice Platform (SRP) pada 2019, menyusun kertas kerja kebijakan (*policy brief*), berpartisipasi dalam lokakarya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan seminar nasional platform beras berkelanjutan.

KRKP menjunjung prinsip nonpartisan, persamaan dan keadilan sosial, keberagaman, keberlanjutan, dan sumber daya lokal.





Bermitra demi mengupayakan perubahan dan inisiatif kebijakan publik yang mendukung produksi beras berkelanjutan.

Standar Kelestarian Beras

Platform Beras Berkelanjutan atau Sustainable Rice Platform disepakati keberadaannya pada 2011. Dipelopori UN Environment Programme

dan International Rice Research Institute (IRRI), inisiatif ini bertujuan mempromosikan keberlanjutan dan efisiensi riset dalam sektor perdagangan beras.

Latar belakang dari keberadaan SRP adalah fakta dan pengakuan bahwa beras merupakan salah satu produk pertanian yang paling menimbulkan polusi. Emisi gas yang dihasilkan dari pengusahaannya—penanaman dan proses panennya—sama dengan yang dihasilkan sektor

penerbangan global secara keseluruhan. Ini masih ditambah fakta bahwa setiap tahun jutaan ton merang dibakar di sawah, mengotori udara di kawasan setempat dan menimbulkan gangguan kesehatan jutaan orang.

Selain itu, padi, sebelum diolah menjadi beras, membutuhkan air yang tak sedikit. Paling tidak antara 30-40 persen dari total air irigasi dunia. Karena dampak perubahan iklim, yang menimbulkan naiknya permukaan laut, kekeringan, dan banjir, petani di Asia Tenggara tergo-long di antara mereka yang rawan.

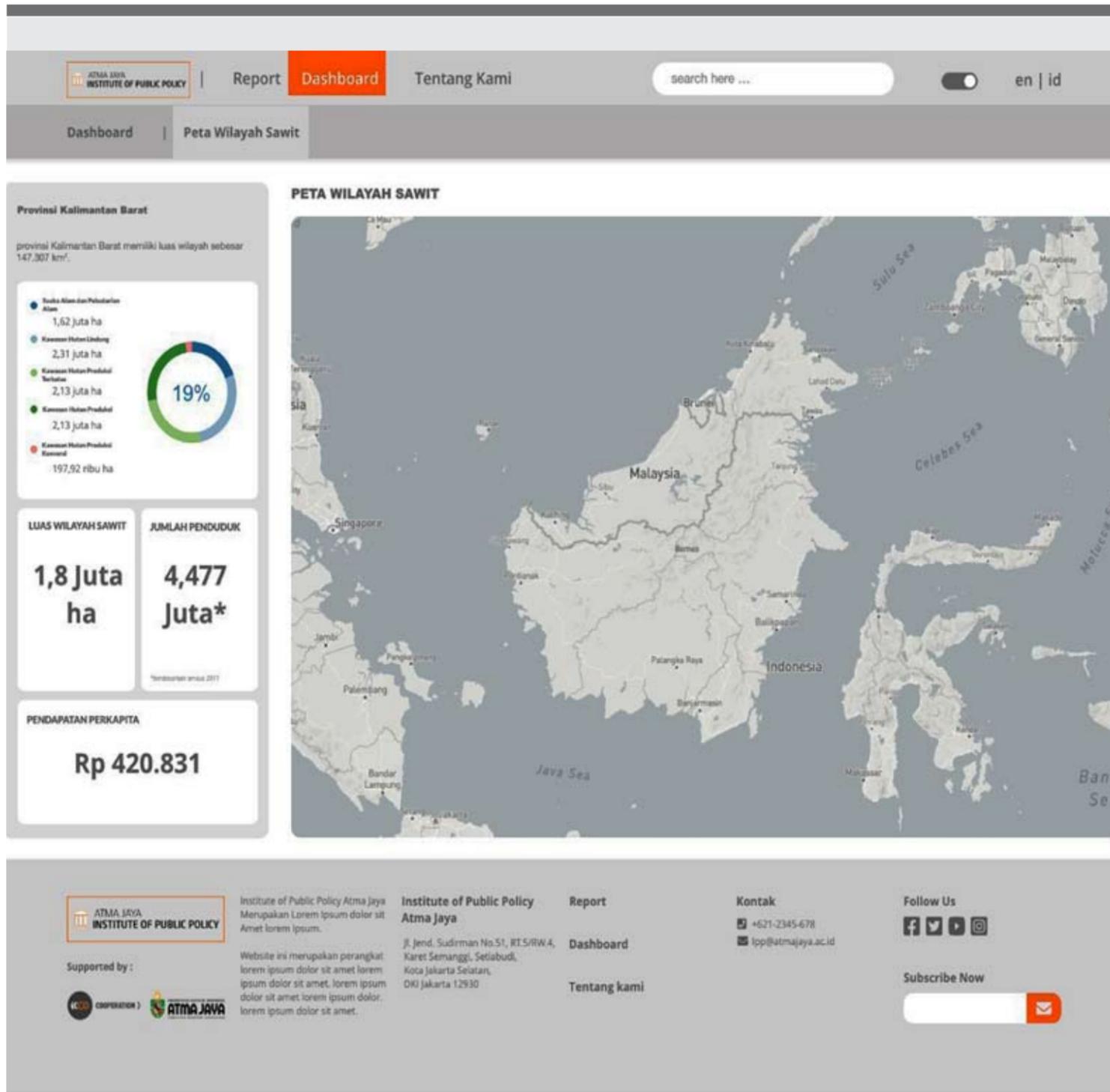
Sebagai sebuah aliansi pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan 100

anggota lebih dari masyarakat umum, swasta, lembaga riset, masyarakat sipil, dan sektor keuangan, SRP mengupayakan transformasi pasar dan inisiatif kebijakan publik. Yang mau dicapai adalah standar yang sifatnya lestari atau berkelanjutan. Standar semacam ini diyakini bisa memperbaiki kehidupan produsen beras dan meminimalkan dampak produksi beras terhadap lingkungan.

Setiap tahun SRP menyelenggarakan sidang pleno dan musyawarah akbar untuk mengkaji ulang kegiatannya dan menyusun rencana ke depan.

Lobi dan advokasi merupakan bagian dari upaya merealisasikan platform yang menjamin mutu beras.





Peta wilayah sawit yang dikembangkan IPP Atmajaya.

Mengukur Kebijakan dengan Data

Kebijakan publik, sebagai tindakan pemerintah, merupakan keniscayaan untuk merespons problem nyata dalam kehidupan masyarakat. Sering yang dibutuhkan bahkan kebijakan yang bukan saja baik, melainkan juga tepat.

Masalahnya, kebijakan yang tepat pun tak jarang sulit dipastikan efektivitasnya. Penyebabnya adalah alat untuk mengukur

kebijakan itu tidak ada. Karenanyalah pembuatan alat ukur mau tak mau harus dilakukan.

Bergabung dengan program Civic Engagement Alliance (CEA), Fakultas Hukum dan Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Atma Jaya antara lain menyangkut tugas menghasilkan modul alat ukur kebijakan publik itu. Dua sasaran yang lain, menurut Asmin Fransiska, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Atma Jaya, adalah alat ukur pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya; dan diseminasi alat ukur dan modul yang dapat diakses dan tersebar bagi yang membutuhkan.

Secara spesifik, alat-alat ukur itu berkaitan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sektor sawit,



Peran akademisi, melalui kerja sama dengan komunitas, berguna untuk menilai berdasarkan data terhadap kebijakan dan penerapannya.

khususnya petani kecil.

“Saya pikir kerja ini bagian atau ruang di mana akademisi seperti saya dan kawan-kawan di dalam tim bisa bekerja bersama komunitas,” kata Asmin.

Dalam kerja sama itu, menurut Asmin, akademisi “memberikan penilaian yang berbasiskan data dan ilmu pengetahuan atas berbagai kebijakan pemerintah dan negara serta implementasinya.”

Di samping itu, yang tak kalah pentingnya, menurut dia pula, adalah bagaimana kontribusi akademisi dalam

melihat dan menilai secara terstruktur implikasi kebijakan dan aturan hukum yang dibuat negara terhadap masyarakat dan komunitas.

Pada pelaksanaannya, di tahap riset, pandemi Covid-19 menimbulkan implikasi serius dalam proses dan hasil kerja. Mulanya riset direncanakan berlangsung tatap muka--dengan bertemu lebih banyak komunitas, mengambil sampel

di beberapa daerah, dan bermuka-muka langsung dengan para pihak. Situasi pandemi mengubah banyak hal. Informasi harus dihimpun melalui diskusi jarak jauh, daring (*online*). Hasil riset pun, menurut Asmin, memerlukan pemikiran ulang untuk memastikan “berguna bagi banyak pihak”.

Pilihan langkah yang lalu diputuskan adalah membuat *website* atau *dashboard* tentang pencapaian hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Isi *website* atau *dashboard* ini, di antaranya, adalah alat ukur yang dapat dipakai para mitra CEA serta panduan penggunaannya. Fakultas Hukum dan IPP

Atma Jaya berharap *website* atau *dashboard* ini dapat diakses masyarakat umum dan peneliti dalam isu-isu kelapa sawit, juga isu-isu lain--tentang perempuan, anak, pekerja, dan kebijakan publik yang mana pun.

Segi baik yang segera disadari adalah dunia digital justru menjadi jembatan menuju keberlanjutan program. Sebab, di sana, terbuka peluang bagi berbagai kelompok dalam masyarakat, juga akademisi, untuk terus mengisi, menambahkan konten, ke dalam apa yang telah ada, juga bagaimana menggunakannya. Di sana

Banyak isu yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia di sektor sawit. Penelitian terhadap aspek-aspek yang ada masih sangat terbuka.



ada potensi akselerasi akses yang sama antarberbagai wilayah di Jakarta, Jawa, dan di luar keduanya; di sana pula terbuka kesempatan untuk memperoleh data dan materi riset, serta bagaimana mengukur suatu isu. “Transformasi digital,” kata Asmin, “kami anggap bukan lagi hal yang negatif.”

Dan memang itulah, yakni mengecilnya jurang informasi antara akademisi dan komunitas, yang diharapkan. Fakultas Hukum dan IPP Atma Jaya, menurut As-

Mengecilnya jurang informasi antara akademisi dan petani bagus untuk mendorong kondisi yang lebih baik, khususnya di sektor sawit.

min, belajar berbagai isu yang selama ini belum pernah ditekuninya walaupun telah didengar. Dengan keterlibatan dalam program CEA, “Kami mendengar langsung dari masyarakat; itu sangat meneguhkan pemikiran kami akan sesuatu,” katanya.

Hal lain yang juga disadari: suatu upaya perubahan, mendorong harapan baik bagi persamaan, kesetaraan, dan keadilan sosial, akan lebih berdampak bila dilakukan bersama, saling mengisi ruang-ruang yang selama ini hanya ditekuni segelintir pihak. Karenanya Fakultas Hukum dan IPP Atma Jaya berharap “tetap bisa bekerja sama, sebagai mitra dan masyarakat”.



ATMA JAYA

BERDIRI pada 1 Juni 1960, Universitas Atma Jaya merupakan buah gagasan yang dibahas dalam rapat para uskup se-Jawa pada Juni 1952. Sekelompok cendekiawan muda Katolik merupakan pionirnya, melalui sebuah yayasan--yang dinamai Yayasan Atma Jaya. Kini universitas ini memiliki delapan fakultas, termasuk Fakultas Hukum, dengan 21 program studi untuk tingkat S1 dan tujuh program master.

Institute of Public Policy (IPP) merupakan lembaga di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Atma Jaya. Dibentuk pada 2017, tujuan lembaga ini adalah memberi sumbangan bermutu tinggi bagi diskursus mengenai kebijakan

publik melalui penelitian serta publikasi, evaluasi, dan diskusi serta konsultasi dengan para ahli dan praktisi. Di samping itu, lembaga ini ingin menjembatani kebijakan publik, sektor swasta, dan universitas melalui penyelenggaraan konferensi dan seminar.

Fakultas Hukum dan IPP Atma Jaya, juga Fakultas Psikologi Atma Jaya, terlibat dalam program Civic Engagement Alliance (CEA) dalam kerangka Pathway 4. Ketiganya berkolaborasi mengembangkan “alat untuk mengukur pemenuhan hak ekonomi dan sosial” bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sektor sawit, dan berfokus kepada petani kecil. Hasilnya, sebuah alat ukur, modul pelatihan, kertas kerja kebijakan (*policy brief*), dan rencana diseminasi, dirampungkan pada Oktober 2020.

Menjembatani kebijakan publik, sektor swasta, dan universitas melalui penyelenggaraan konferensi dan seminar.



Lazim usaha kecil, termasuk untuk produk pertanian, kesulitan memasuki pasar. Macam-macam hal jadi penyebab. Upaya mengatasi hal itu perlu untuk memberdayakan pelakunya.

Beraliansi

Membuka Akses Pasar

Pemberdayaan petani-pekebun sering terkesan sebagai cita-cita yang digantungkan terlalu tinggi. Sejumlah hal menjadikan tantangan untuk mewujudkannya ibarat mendaki bukit terjal.

diaan data, kebijakan yang membingungkan dan tak propengusaha kecil. Di sektor tertentu bahkan ada persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia--pekerja anak, upah yang rendah.

Tidak kurang gawat dari semua hal itu adalah fakta bahwa sektor swasta, juga pemerintah, tak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menghormati hak asasi manusia dalam operasi bisnis atau rantai pasokan yang ada.

Area itu masuk ke dalam "radar" program Civic Engagement Alliance (CEA) di Indonesia. Ada dua hal yang direspons: tantangan berkaitan dengan komoditas-komoditas yang telah dipilih, sesuai dengan intervensi oleh para mitra; dan, di area komoditas-komoditas itu pula, proses serta program dari kebijakan pemerintah yang tengah berlaku, seperti promosi kawasan yang ramah anak, pembua-

Hal-hal itu bukan saja berupa problem "teknis", seperti produk dan kualitas yang rendah, benih yang terbatas, dan teknologi yang tak memadai, melainkan juga sistem perdagangannya, minimnya keterse-

tan prosedur operasi standar atau *standard operating procedure* (SOP) untuk rempah, dan Gratiexs.

Secara mendasar, rumusan program CEA sebetulnya bertumpu pada peningkatan kapasitas lobi dan advokasi anggota, mitra, dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kalangan masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta. Dalam hal ini, termasuk pula upaya menguatkan lobi dan advokasi berlandaskan data (*evidence-based advocacy*).

Di Indonesia, ada penyesuaian dalam pengembangannya, yakni memperhitungkan program-program yang telah dan sedang dikerjakan para mitra dan didukung anggota CEA, ICCO Cooperaton, Kerk in Actie, dan CNV, atau donor lain. Program-program ini berfokus kepada pemberdayaan petani kecil di berbagai rantai nilai, perbaikan praktik pertanian dan peningkatan akses pasar; menanggulangi pekerja anak dan memberlakukan kawasan bebas pekerja anak; juga memperkuat kapasitas serikat pekerja dalam mewakili anggotanya serta merundingkan kondisi kerja yang lebih baik.

Semua kegiatan tersebut bersesuaian dengan Pathway 3 dan Pathway 4 dalam Theory of Change (ToC) generiknya--yang dibuat dan disepakati pada 2015. Program CEA menyediakan peluang untuk melengkapi intervensi-intervensi itu dengan agenda lobi dan advokasi yang spesifik.

Secara spesifik pula, dalam kerangka Pathway 3, yang hendak dicapai program CEA di Indonesia adalah berkontribusi bagi kebijakan

yang membuka akses pasar yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini terutama dikaitkan dengan empat komoditas, yakni rempah, beras, hortikultura, dan teh--yang belakangan dikurangi menjadi dua komoditas saja, yakni rempah dan beras.

Untuk mencapai hal-hal itu, yang dibayangkan bisa diwujudkan adalah adanya perubahan kapasitas dan perilaku organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) serta dewan komoditas, sektor swasta serta pemerintah. Perubahan ini, tentu saja, menyangkut pengadaan fasilitas bagi pasar yang inklusif atau merangkul siapa saja, produksi komoditas yang memenuhi standar, pengembangan organisasi, dan praktik pertanian yang baik.

Berdasarkan diskusi, juga lokakarya-



lokakarya yang diadakan terutama sebelum pelaksanaan program, tak ada perubahan mendasar dalam ToC-nya. Sebagai hal baru, para mitra, seperti halnya anggota CEA, memerlukan waktu untuk bisa mengenal ToC secara lebih baik. Belakangan ada adaptasi-adaptasi, tapi ini dilakukan semata-mata di tingkat operasional.

Misalnya keputusan pada 2018 untuk mempersempit fokus dan mencoret dua dari empat komoditas yang dipilih--yakni hortikultura dan teh--karena intervensi dalam kerangka Pathway 3 berjalan lambat. Penyebabnya: ketidakjelasan mengenai apakah akan berin-

Memperbaiki praktik pertanian demi menghasilkan produk berkualitas, terstandarisasi (kiri) dan meningkatkan keterampilan penanganan pascapanen (kanan) juga penting untuk pemberdayaan. Kesejahteraan bertumpu di sana.

teraksi dengan dewan komoditas atau tidak dan bagaimana caranya. Yang tampak dari sini adalah adanya dinamika yang berbeda-beda untuk setiap komoditas.

Mempersempit cakupan program juga dipandang relevan. Langkah ini memungkinkan pengarahannya dan intervensi ke lebih sedikit komoditas, seraya menangkap momentum politik pada rantai nilai tertentu yang menawarkan peluang bagi upaya lobi

dan advokasi. Sehubungan dengan inilah pada 2019 diputuskan menambah dua mitra agar intervensi dalam kerangka Pathway 3 lebih lengkap.

Hal lain yang patut digarisbawahi, dalam pendekatan lobi dan advokasi melalui program CEA, adalah investasi untuk dialog antara masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah; juga promosi dan fasilitasi jaringan di level lokal maupun nasional. Ini merupakan langkah inovatif dan berguna yang diakui sejumlah pemangku kepentingan. Ditambah kontribusi positif mitra CEA dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, langkah ini memungkinkan dijembatannya praktik lokal dan lobi serta advokasi di level nasional.

Tak kalah pentingnya adalah dukungan bagi pengembangan kapasitas. Hal ini dilakukan melalui pelatihan, lokakarya tahunan, kunjungan, coaching, dan belajar seraya menjalankan. Pelatihan memungkinkan mitra untuk memperkuat kompetensi dalam berinteraksi dengan target lobi, dan berkontribusi secara berarti untuk forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mendukung dialog-dialog ini, alat, panduan atau pedoman, dan bahan pun dibuat.

Praktik lobi dan advokasi juga diperkuat melalui metode belajar sambil melakukan. Ini dilengkapi dengan peran coaching dari ICCO dan CNV.

Dengan target masing-masing, dan waktu yang tersedia, setiap mitra menghadapi kesulitan berbeda-beda di lapangan. Di level



Pemilihan komoditas yang terbatas dalam pelaksanaan program memungkinkan dibangunnya keahlian dan perhatian khusus terhadap rantai nilai yang berlaku.

nasional, umpamanya, kendalanya adalah lambannya respons pemerintah, pergantian pejabat setelah pemilihan umum 2019, dan tarik-menarik kepentingan di kementerian-kementerian yang berbeda. Tapi, secara umum, apa yang dikehendaki pada akhirnya bisa direalisasikan. Dalam kerangka Pathway 3, misalnya, Yayasan Penabulu berhasil merampungkan penyusunan SOP untuk komoditas rempah dan terlibat dalam uji cobanya-- sebuah proyek yang, dalam persiapannya, melibatkan pula petani kecil.

Berdasarkan evaluasi pascaprogram, bisa dikemukakan bahwa, dalam mewujudkan hasil dan dampak yang dibayangkan, program CEA menunjukkan relevansi, efektivitas, efisiensi, dan--dalam batas tertentu--potensinya untuk berlanjut. Di antara yang terlihat kuat adalah dialog dengan berbagai aktor swasta, dengan sudut pandang yang

bertolak belakang bila diperlukan; pilihan komoditas yang terbatas, yang memungkinkan dibangunnya keahlian dan perhatian khusus terhadap rantai nilai yang dipilih; perhatian terus-menerus bagi petani kecil dalam seluruh intervensi; investasi untuk membuat jaringan dan forum yang merangkul berbagai pemangku kepentingan; aplikasi dari paduan strategi lobi dan advokasi yang cerdas, berfokus kepada strategi lobi dan advokasi "orang dalam" dengan lobi dan advokasi berdasarkan bukti; pelatihan dan penyesuaian yang ajek dari strategi operasi selama penerapan program.

Yang patut mendapat perhatian lebih adalah aspek keberlanjutan program. Hasil evaluasi menunjukkan tak adanya temuan yang tegas atau gamblang.

Kelangsungan lembaga sebetulnya tak diragukan. Hal ini merupakan hasil dari pilihan topik program kebijakan yang relevan, pilihan strategis yang dibuat, seleksi mitra, dan perhatian dari program untuk membangun lebih lanjut kompetensi dan kemampuan lobi dan advokasi. Tapi apa yang bisa didapat dari peningkatan program, atau sebaliknya, tergantung ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang bisa dihimpun mitra, dalam proyek yang ada maupun proyek baru.

Berkaitan dengan hal itu, strategi peningkatan program memang tidak dibuat dan tergantung inisiatif sektor swasta dan/ atau pemerintah. Tidak ada jaminan dana yang diperlukan bisa dikumpulkan oleh sektor swasta maupun pemerintah.



Perlu mengeksplorasi pathway atau jalur alternatif yang bisa berperan merealisasikan perubahan yang dikehendaki.

Rekomendasi- Rekomendasi

Kontekstualisasi TOC secara reguler

Sebagai hal baru, penerapannya membutuhkan upaya belajar lebih banyak. Ada momentum untuk memperbaiki Theory of Change (ToC). Misalnya: (1) mengidentifikasi asumsi tentang relasi di antara aktor-aktor yang berbeda dan menambahkan asumsi sebab-akibat; (2) membuat kaitan lebih gamblang antara beberapa pathway ; (3) mengeksplorasi pathway alternatif yang bisa ikut berperan mencapai perubahan yang dibayangkan, atau menjadikannya lebih eksplisit untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan aktor/program lain.

Agenda pembelajaran adalah bagian integral dalam program

Agenda ini bisa dibuat berdasarkan asumsi-asumsi dalam ToC. Mitra bisa memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak dalam alur belajar tertentu. Misalnya, bisa jadi

menarik untuk membuat pemahaman belajar tentang penggunaan dan hasil uji tuntas *tool-kit* . Asumsinya: perusahaan di sektor sawit tertarik kepada “penciptaan nilai bersama”. Tapi hasil evaluasi justru mengindikasikan adanya resistensi di antara perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan hak anak atau dalam mematuhi persyaratan-persyaratan uji tuntas. Jadi, ada kemungkinan diperlukan intervensi lain.

Bikin alur penguatan kapasitas yang jelas

Hal ini mungkin membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan kapasitas di level organisasi, untuk meningkatkan pemahaman kapasitas lobi dan advokasi dalam organisasi, untuk mengembangkan rencana aksi sesuai kebutuhan di level organisasi, juga monitoring -nya. Konsekuensinya adalah adanya tuntutan peningkatan kapasitas spesifik di level mitra CEA.



Mitra program ikut menentukan materi dan topik pembelajaran sesuai kebutuhan

Untuk program CEA di Indonesia, partisipasi dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan adalah strategi penting. Karenanya perhatian lebih banyak bisa diberikan untuk meningkatkan pemahaman karakteristik kemitraan di antara banyak pemangku kepentingan, bagaimana cara kerjanya, peran anggotanya, dan bagaimana merancang serta memfasilitasinya.

Setiap aktor di sektor swasta punya karakter sendiri. Forum belajar bersama-sama perlu untuk menguasai strategi pendekatan yang pasti berbeda-beda pula (atas kiri).

Tingkatkan strategi untuk meyakinkan aktor-aktor sektor swasta agar mau mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan hak anak

Diperlukan pendekatan yang berbeda-beda untuk aktor-aktor sektor swasta yang berlainan. Diperlukan pula strategi yang memungkinkan disalurkan umpan balik,

diadakannya jasa khusus, disebarluaskannya praktik-praktik baik atau kasus-kasus bisnis, dilakukannya eksplorasi insentif; juga adanya visi untuk mendorong adopsi yang lebih luas.

Perlu strategi untuk menautkan lobi dan advokasi level lokal-nasional dengan level global dalam ToC

Keterkaitan di antara ketiganya bisa diperkuat melalui penyusunan ToC bersama-sama. Bisa dianalisis lebih jauh apakah pendekatan berdasarkan proyek berpengaruh negatif dalam menguatkan kolaborasi dan penautan di antara anggota dan mitra CEA yang berbeda pada level nasional dan global.

Tingkatkan kapasitas lobi dan advokasi

Diskusi lebih lanjut dengan mitra bisa dilaksanakan tentang penggunaan alat monitoring bagi lobi dan advokasi. Harus dieksplorasi apa hambatan dalam pembuatan cerita perubahan dan dalam menggunakan buku catatan lobi. Bisa pula dieksplorasi apakah relevan atau tidak memantau hasil intervensi lobi dan advokasi melalui seperangkat penanda kemajuan.

Cari tahu cara memonitor efisiensi secara gamblang

Laboratorium Partos di Belanda telah menelaah beberapa alat yang bisa digunakan untuk hal ini, khususnya menaksir efisiensi dari strategi intervensi yang berlainan.

Bikin strategi keberlanjutan saat mendesain program

Keberlanjutan program dan keuangan dari mitra bisa ditingkatkan melalui penyusunan strategi keberlanjutan. Model kanvas bisnis yang diperkenalkan dalam CEA yang lalu bisa menjadi permulaan yang baik. Ada peluang menempatkan beberapa mitra sebagai wirausaha sosial (*social enterprise*). Bisa dieksplorasi bagaimana produk seperti Dakota bisa dipasarkan, dan/atau apakah relevan menjual jasa konsultasi—beberapa mitra telah diakui sebagai partner sah oleh pemerintah—kepada sektor swasta.



Pembelajaran untuk ToC Generik

Theory of Change program Civic Engagement Alliance (CEA) disusun berdasarkan perubahan yang penyebabnya bersifat linear. Asumsinya: bertambahnya pengetahuan dan keterampilan akan memicu perubahan perilaku. Tapi, dalam praktik, tampak betapa diperlukan lebih banyak insentif untuk meyakinkan sektor swasta agar mau mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, sebetulnya ada jalur (*pathway*) atau strategi lain, yang memungkinkan terjadinya perubahan, yang tak dieksplorasi atau dibikin terang dalam ToC. Hal lain: ToC tak memberikan wawasan mengenai aktor-aktor lain yang berkontribusi dalam membayangkan perubahan



dan bagaimana mitra CEA bisa bersimpati terhadap aktor-aktor itu.

ToC juga tidak cukup gamblang tentang relasi di antara aktor-aktor yang berlainan:

Sangat mungkin teori yang menjadi dasar program luput memasukkan kemungkinan strategi lain, walaupun pembuatannya telah melibatkan banyak pihak.

organisasi masyarakat sipil, bisnis besar dan kecil, kelompok atau asosiasi bisnis, dewan komoditas, dinas pemerintah, kementerian, dan sebagainya. Semuanya ada di setiap tingkat dalam *pathway* tanpa penjelasan mengenai hubungannya yang saling menguntungkan.

Selain itu, keterkaitan antara kedua *pathway* tak dijelaskan, begitu pula sinergi di antara para mitra. Yang tampak menonjol adalah upaya untuk mengidentifikasi beberapa asumsi, berkaitan dengan level perubahan yang berbeda-beda. Asumsi dirumuskan, terutama, menurut kapasitas dan kesediaan para aktor, yang sering merupakan asumsi yang relevan. Asumsi yang merujuk kepada hubungan di antara berbagai aktor yang berlainan bisa dibuat lebih eksplisit. Asumsi sebab akibat tidak dirumuskan.

Laporan awal menggambarkan beberapa asumsi, yang mungkin relevan untuk mengilhami formulasi asumsi sebab akibat.

Sejumlah asumsi bisa menjadi subyek agenda belajar yang eksplisit, misalnya apakah penggunaan *toolbox* pedoman uji tuntas menghasilkan perubahan perilaku sektor swasta (adanya hubungan antara pengetahuan yang meningkat dan perilaku); bagaimana terlibat dalam dialog dengan sektor swasta; akankah praktik terbaik punya pengaruh positif dalam meyakinkan perusahaan lain.